

# Manajemen Sampah dalam Pemanfaatan Potensi Sampah Secara Optimal (Studi Kasus Kota Bogor)

Zulkifli Zainuddin<sup>1)</sup>, Ujang Kusnaedi<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Manajemen, STIE Ganesha

Jalan Legoso Raya No 31, Pisangan, Kec Ciputat Timur, Tangsel 15419

<sup>2)</sup>Akuntansi, STIE Ganesha

Jalan Legoso Raya No 31, Pisangan, Kec Ciputat Timur, Tangsel 15419

Email: [uki.zulkifli@gmail.com](mailto:uki.zulkifli@gmail.com)

**Abstract:** *Everyday waste production is increasing along with the increase in the number of products and people's consumption patterns. The increasing waste problem is being neglected, as waste management is difficult for the community to control. This waste problem is increasing from year to year. The purpose of this research is to determine waste management carried out by the Bogor City Environmental Service looking at management functions, namely planning, organizing, implementing and supervising. This research uses qualitative analysis by taking a case study at the Bogor City Environmental Service. Data collection techniques were carried out using interviews, literature studies, and documentation through primary and secondary data sources. The research results show that waste management by the Bogor City Environmental Service has been implemented well starting from the planning, organizing, implementing and monitoring stages, although there are still several parts that need to be improved, such as human resource problems and also due to limited land for waste management.*

**Keywords:** *controlling, mobilizing, organizing, planning, waste*

**Abstrak:** *Produksi sampah setiap hari kian meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Konsekuensinya masalah sampah menjadi terabaikan seperti pengelolaan sampah yang sulit dikendalikan oleh masyarakat. Permasalahan sampah ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor melihat fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan mengambil studi kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi melalui sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor telah terlaksana dengan baik mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan, meskipun masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki seperti masalah SDM dan juga karena keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah.*

**Kata kunci:** *kontrol, mobilisasi, pengelolaan, perencanaan, sampah*

## I. PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan diantaranya adalah pengelolaan sampah yang masih kurang mendapat penanganan secara optimal dari berbagai pihak, baik dari masyarakat setempat maupun pemerintah daerah. Dimana dalam kehidupan sehari-hari, kita cukup akrab dengan kata sampah. Sampah adalah

barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Sampah yang kita hasilkan biasanya kita buang ke tempat sampah dan kemudian dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). TPS yaitu tempat

sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Dari TPS, sampah akan diangkut dan dibawa oleh Dinas Lingkungan menggunakan truk sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Sampah yang dikelola berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Dalam penanganan yang kurang optimal akan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti timbulnya banjir, timbulnya penyakit, sanitasi lingkungan memburuk, turunnya kandungan organik lahan pertanian, dan mempercepat terjadinya pemanasan global.

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah diperlukan tidak hanya sebatas dalam membuang sampah di tempat yang seharusnya, namun diharapkan termasuk juga pengolahan sampah yang memberikan manfaat kembali bagi masyarakat itu sendiri.

Pengelolaan sampah di Indonesia dibagi menjadi dua, pertama yaitu pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan kedua yaitu pengelolaan sampah spesifik. Pengelolaan sampah spesifik adalah

tanggung jawab pemerintah, sedangkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah, pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Dalam hal ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki perannya masing-masing.

Kegiatan penanganan sampah meliputi: pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifatnya; pengumpulan sampah ke tempat pengolahan residu; pengangkutan sampah dari tempat pengolahan residu ke TPA; pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah, pembiayaan tersebut berasal dari APBN dan APBD.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi yang dimaksud

berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan, pengobatan, dan kompensasi dalam bentuk lain.

Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peran masyarakat antara lain pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perumusan kebijakan pengelolaan sampah, dan/atau pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Masyarakat di daerah aliran sungai Ciliwung Kota Bogor merupakan pemukiman padat penduduk dengan beraneka profesi pekerjaan yang digeluti seperti, pedagang makanan, tukang rokok, hingga meubel bekas sehingga masyarakat bantaran yang rata-rata memiliki penghasilan yang rendah yang akan mewakili masyarakatnya pada cerminan hidup, dengan kondisi yang dimaksud, ditemukannya sampah-sampah yang dibuang di pinggir jalan bahkan di selokan. Tentunya hal ini akan berdampak buruk bagi kebersihan lingkungan, estetika lingkungan, dan kesehatan warga.

Pengumpulan (pengelolaan) sampah di daerah tersebut masih kurang baik karena semua jenis sampah bercampur menjadi satu, belum ada pemilahan sampah sesuai jenisnya, sampah yang dapat terurai (organik) dan sampah yang tidak dapat

terurai (anorganik). Sehingga pengelolaan sampah kawasan pemukiman tersebut belum sepenuhnya melibatkan masyarakat. Untuk keberlanjutan pengelolaan sampah permukiman dapat dilakukan dengan usaha memanfaatkan sampah menjadi lebih bermanfaat. Guna mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah permukiman.

Kewajiban pemerintah daerah antara lain menyediakan fasilitas pengolahan sampah seperti Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS 3R), Stasiun Peralihan Antara (SPA), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Sedangkan dalam proses operasional kesehariannya dapat melibatkan peran serta masyarakat di lingkungan terkait.

Optimalisasi pengelolaan sampah kawasan permukiman berhubungan dengan pengelolaan sampah yang baik akan berdampak baik terhadap lingkungan dan akan berakibat positif terhadap kesehatan masyarakat. Sehingga optimalisasi pengelolaan sampah kawasan permukiman berdampak terhadap lingkungan serta berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan manajemen pengelolaan sampah di permukiman tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti Dosen Prodi Manajemen S1 dari STIE Ganesha mengadakan kegiatan penelitian yang berjudul "Manajemen Sampah dalam pemanfaatan potensi sampah secara optimal" dengan menggunakan empat fungsi manajemen yang menjelaskan bahwa fungsi manajemen yang terdiri dari (1) Planning (Perencanaan), (2) Organizing (Pengorganisasian), (3) Actuating (Penggerakan), dan (4) Controlling (Pengawasan).

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni suatu metode yang lebih menekankan terhadap penjelasan mengenai suatu permasalahan, dengan tidak menggunakan pengukuran dengan standar-standar tertentu. Subjek penelitian ini melibatkan masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai Ciliwung. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dengan bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui data kualitatif dengan bersumber dari data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan mulai dari reduksi, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Sementara kualitas data dilakukan dengan triangulasi teori, sumber, dan teknik. Triangulasi adalah pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada

saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perencanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor**

Indeks kinerja pengelolaan sampah nasional masih relatif kurang. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) skor Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) di Indonesia sebesar 50,25 poin pada 2022, mengalami kenaikan 0,38 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 50,06 poin. IKPS dihitung berdasarkan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang berarti naik sedikit saja dan belum berdampak baik atas kehadirannya. Penilaiannya dilakukan di 145 kabupaten/kota pada tahun 2022 dan pernyataan di atas serupa pada ungkapan penelitian dari Eva Anggi Ariyani dkk yang mengatakan terdapat 8 Kabupaten/Kota yang dikategorikan cukup baik dalam pengelolaan sampah.

Pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor belum terlaksana dengan efektif yang digambarkan Realisasi dan capaian kinerja

Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020 mengungkapkannya pada tabel berikut.

**Tabel 1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Layanan Persampahan	Persentase Volume Sampah Terangkat ke TPA	77,00	81,31	104,30
	Persentase sampah reduksi	6,80	7,8	118,90

Sumber: Laporan kinerja instansi Pemerintah, 2022

Tabel 1 di atas menunjukkan mengenai keterlibatan pada faktor yang mempengaruhi dalam manajemen pengelolaan sampah seperti aspek kelembagaan, aspek operasional, aspek pembiayaan, aspek peran serta masyarakat.

Permasalahan sampah di Kota Bogor dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang merupakan unsur dari pelaksana pemerintah kota yang bertanggung jawab dalam mewujudkan lingkungan kota yang bersih dan nyaman. Permasalahan sampah di Kota Bogor sebagian besar dipicu oleh pertumbuhan jumlah penduduk dan perilaku masyarakat sehingga berpengaruh terhadap sampah yang dihasilkan. Semakin besar jumlah penduduk di suatu wilayah maka timbunan sampah yang dihasilkan akan semakin besar. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan kebiasaan membuang sampah sembarangan

berakibat semakin sulitnya penanggulangan sampah.

Persampahan menjadi masalah utama lingkungan hidup di Kota Bogor, yang diidentifikasi terbatasnya daya tampung tempat pembuangan akhir (TPA), pelembagaan pengelolaan sampah kota menuju konsep zero waste, pemahaman masyarakat akan pengelolaan sampah berbasis 3R masih terbatas. Pelaksanaan manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dimana mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga baik pasal 1, 2 dan 3. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah terhadap wilayah administrasinya dengan catatan sesuai dengan kebijakan pada tingkat di atasnya. Undang-Undang Pengelolaan Sampah dilakukan oleh Kabupaten/Kota berdasarkan pada NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria) pengelolaan sampah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Strategi pengelolaan sampah DLH Kota Bogor menunjukkan bagaimana peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam mengelola sampah adalah dalam upaya memanfaatkan sampah yaitu menciptakan Bank Sampah. Bank Sampah merupakan

salah satu alternatif mengajak warga peduli dengan sampah. Perencanaan yakni dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai dalam mencapai tujuan. Perencanaan yakni telah mempersiapkan kebutuhan, memperhitungkan segala kendala dan perumusan bentuk pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan. Perencanaan pengelolaan sampah di Kota Bogor mempunyai dasar penyusunan perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek merupakan peraturan tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah dari Pemerintah Pusat, RPJMN, RPJMD, dan Jakstrada atau (Kebijakan Strategi Daerah).

Selanjutnya program prioritas dari pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yaitu pembangunan dan operasionalisasi PSEL dan Pengurangan timbulan sampah di tingkat rumah tangga dengan prinsip 3R dan Dinas Lingkungan Hidup saat ini terus berupaya dalam pengelolaan sampah yang diharapkan bisa memberikan imbas positif bagi kehidupan masyarakat atau publik, salah satunya dengan upaya mengkonversi sampah menjadi energi terbarukan yang dalam pengelolaannya bisa menjadi bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA). Dengan adanya PLTSA ini memberikan berbagai perspektif “control and co-creation” maka dapat

terjadi pengurangan limbah sampah, penyediaan energi listrik, dan perubahan budaya buang sampah di muara akhir atau TPA.

## **B. Pengorganisasian Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor**

Pengorganisasian atau organizing merupakan proses kegiatan dalam menyusun atau alokasi sumber daya organisasi dengan tujuan yang tertuang dalam visi dan misi, sumber daya organisasi, dan lingkungan bisnis perusahaan. Di dalam fungsi manajemen organizing proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya diantara anggota organisasi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis, dapat disimpulkan bahwa jumlah petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun (B3) yang diantaranya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga harian lepas (THL), tenaga kerja dengan perjanjian kerja (TKPK) dan Outsourcing (OC).

Pendelegasian petugas menyesuaikan dengan kapasitas petugas yang ada dan belum dapat dilakukan sesuai dengan keahlian karena keterbatasan sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada Dinas

Lingkungan Hidup Kota Bogor dilihat dari segi jumlah sudah cukup memadai dalam mendukung proses pengelolaan persampahan, namun dalam menyelesaikan pekerjaan masih belum optimal sehingga diberikan penambahan jam kerja kepada para petugas kebersihan.

### **C. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor**

Masalah persampahan telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah dan diwajibkan untuk menyelenggarakan penanganan persampahan termasuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara lebih memadai, untuk kondisi tertentu TPA regional juga wajib dilaksanakan. Pengelolaan sampah di Kota Bogor hingga saat ini masih menggunakan sistem open dumping atau penimbunan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kinerja pengelolaan sampah belum optimal dengan masih terbatasnya sarana dan prasarana penanganan sampah pada semua sistem pengelolaan sampah, dan masih sedikit masyarakat maupun pihak swasta yang melakukan upaya 3R untuk pengelolaan sampah.

Faktor yang mempengaruhi dalam manajemen pengelolaan sampah seperti kelembagaan, operasional, dan pembiayaan. Penanganan sampah di Kota

Bogor dibagi ke dalam beberapa bagian dengan penanggung jawab yang berbeda. Penanganan sampah rumah tangga di wilayah merupakan kewenangan kelurahan masing-masing, sampah yang dihasilkan oleh pasar merupakan kewenangan Dinas Perdagangan Kota Bogor, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup menangani sampah hasil penyapuan jalan, sampah yang dihasilkan di taman, hasil perempelan/penebangan pohon dan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS). Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor terus melakukan peningkatan pengelolaan sampah dengan meningkatkan sarana prasarana penanganan sampah. Selain itu, dilakukan juga pengurangan produksi sampah melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menerapkan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) seperti bank sampah.

### **D. Pengawasan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor**

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan indikator persentase pengawasan antara lain meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

Menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor adalah observasi lokasi dan evaluasi pengelolaan sampah, hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pimpinan yang berwenang dalam melakukan pengawasan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dapat meningkatkan sarana dan prasarana dalam manajemen pengelolaan sampah terkait kemanajementan di Kota Bogor. Hal ini tentunya dapat menjadi faktor pendorong dalam mengelola sampah di wilayah administrasi Kota Bogor.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Hasibuan, Muhammad Fahrizal. 2021. Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Riau: Jurnal Pusat Akses Kajian Manajemen

Makara, Wacana. Tanpa Tahun. Sungai Ciliwung Kini. Diakses pada Selasa 05 Desember 2023 dari <https://www.ui.ac.id/sungai-ciliwung-kini/>.

Pemerintah Kota Bogor. 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022. Bogor: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Peraturan Pemerintah RI. 2012. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Jakarta: Lingkungan Hidup.

Rahardjo, Mudjia. 2010. Triagulasi dalam penelitian kualitatif. Diakses pada Selasa 05 Desember 2023 dari <https://shorturl.at/CFQW5>.

Hermanto. 2023. Sisa Makanan, Plastik, dan Kertas Komposisi Sampah Paling Dominan. Diakses pada Selasa 05 Desember 2023 dari <https://shorturl.at/IPUW3>.